

Para Kades Ancam Ngadu

dari halaman **KARAWANG BEKASI EKSPRES**

“Ya betul, kabarnya memang dari Kadin DPMD Karawang, dan Asda II, bahwa DBH dipastikan tidak ada pemotongan,” kata Udin.

Sementara, Wakil Ketua Apdesi Karawang mengatakan, Ombi, pihaknya memang sudah merancang sejumlah aksi dan gerakan untuk mendesak Pemkab

Karawang. Agar tidak melakukan pemangkasan DBH 2020 yang notabene diserap dari PAD tahun 2019.

Namun, Kades Ombi bilang, sebelum aksi itu digelar, Pemkab Karawang sudah mengeluarkan putusan DBH batal dipangkas.

“Ya memang tadinya kalau tidak ada respon kita mau ke BPK. Melaporkan DBH ini

yang baru 7 persen saja, bukan 10 persen,” ungkapnya.

Kades Ombi menjelaskan, sesuai yang diamanahkan undang-undang desa, DBH PDRD ini wajib kembali digelontorkan sebesar 10 persen ke desa-desa secara proporsional dan profesional.

Ombi mengatakan, pembatalan pemangkasan ini dianggap sudah yang paling tepat. Mengingat, Pandemi Covid-19 baru terjadi di tahun

2020. Jika pun nanti DBH di tahun depan harus di pangkas. Apdesi mengaku siap.

“Kalau tahun depan di pangkas kita siap. Alasannya kan logis. Karena Pandemi Covid-19 ini terjadi di tahun 2020,” singgungnya.

Sementara, hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang, Agus Mulyana, belum memberikan jawaban. **(wyd/mhs)**